

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet, V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung,1999.
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, 2020
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono,*Metodelogi penelitian hukum*,Depok : Raja Grafindo, 1996.
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta:Rajawali Pers,1989.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti,2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- A. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2009.
- H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 2012.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999.
- MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco,1955.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987.
- R. Wirjono Prodjodikoro : *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 2014.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan  
 dan pemberantasan perusakan hutan  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan  
 Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada  
 Kementerian Kehutanan  
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  
 P.64/Menlhk/Sekjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil  
 Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan  
 dan Penggantian Nilai Tegak  
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  
 P.7/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan  
 dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi  
 Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan Iuran Izin Usaha  
 Pemanfaatan Hutan.

### C. JURNAL ILMIAH

- Angela, Cindy, M. Iman Santoso, and Firman Wijaya. (2019).  
 "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa  
 SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)." *Krisna Law*, 2019
- Okyusran, D.PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM  
 BENTUK TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT  
 KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN. *Unes Journal of Swara  
 Justisia*, 2018
- Wirya, A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak  
 Pidana Kehutanan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 2015
- Fance M. Wantu. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan  
 dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 ,  
 Gorontalo, 2020
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana  
 Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, Kanun Jurnal  
 Ilmu Hukum, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015

Abdul Rahman Upara, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Legal Pluralism, Vol. 5, No. 1, 2015

Syahrizal, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusaka hutan di kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Wahana Foresta:: Jurnal Kehutanan, Vol.11, No.1, Januari 2016.

Abdul Rahman Upara, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Legal Pluralism, Vol. 5, No. 1, 2015.

#### **D. WEBSITE**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013>

<https://itjen.menlhk.go.id/peraturan/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p-64-menlhk-setjen-kum-1-7-2016>